
Evaluasi Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Anak Jalanan Di Dinas Sosial Kota Bekasi**Arshellia Prasetya Jati¹; Sawitri Budi Utami²; Neneng Weti Isnawaty³***Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia**¹arshellaapj@gmail.com ; ²sawitri.budi@unpad.ac.id ; ³nenengwety@gmail.com***ABSTRACT**

THIS RESEARCH IS MOTIVATED BY THE PHENOMENON OF STREET CHILDREN WHO HAVE INCREASED EVERY YEAR AND THE PRESENCE OF DISTURBING STREET CHILDREN ALSO DISTURBS THE COMMUNITY IN BEKASI CITY. TO REDUCE THE NUMBER AND RESTORE THE SOCIAL FUNCTION OF STREET CHILDREN, THE AGENCY OF SOCIAL SERVICE OF BEKASI CITY HELD A SERVICE AND REHABILITATION PROGRAM FOR STREET CHILDREN. HOWEVER, AFTER THIS PROGRAM WAS IMPLEMENTED, STREET CHILDREN STILL RETURNED TO THE STREETS AND DID NOT BEHAVE IN ACCORDANCE WITH THE PREVAILING SOCIAL VALUES AND NORMS. THE AUTHOR SEES A PROBLEM IN EVALUATING THE SERVICE AND REHABILITATION PROGRAM FOR STREET CHILDREN. THE PURPOSE OF THIS STUDY WAS TO FIND OUT AND ANALYZE HOW TO EVALUATE THE SERVICE AND REHABILITATION PROGRAM FOR STREET CHILDREN AT THE AGENCY OF SOCIAL SERVICE OF BEKASI CITY. BY USING THE THEORY, NAMELY THE FIVE STEPS OF IMPLEMENTING PROGRAM EVALUATION ACCORDING TO DEBRA J. HOLDEN AND MARC A. ZIMMERMAN (2012), NAMELY ASSESS CONTEXT, GATHER RECONNAISSANCE, ENGAGE STAKEHOLDERS, DESCRIBE THE PROGRAM, AND FOCUS THE EVALUATION. THE METHOD IN THIS STUDY USES QUALITATIVE RESEARCH METHODS. THE RESULTS SHOWED THAT THE SERVICE AND REHABILITATION PROGRAM FOR STREET CHILDREN AT THE AGENCY OF SOCIAL SERVICE OF BEKASI CITY HAD NOT GONE WELL, BECAUSE THE EVALUATION OF THE PROGRAM HAD NOT BEEN INFORMATIVE IN DELIVERING THE EVALUATION RESULTS AND HAD NOT SHOWN THE EFFICIENT PROGRESS OF THE PROGRAM, SO IT WAS NOT IN ACCORDANCE WITH THE FIVE STEPS OF IMPLEMENTING THE PROGRAM EVALUATION. THEN, PROBLEMS ARE STILL FOUND IN THE PROGRAM FACILITIES AND INFRASTRUCTURE THAT CANNOT BE USED OPTIMALLY AND THERE ARE STILL SHORTCOMINGS. THE DESIGN OF THE PROGRAM EVALUATION PLANNING MATRIX HAS NOT YET BEEN COMPILED AND HAS NOT INVOLVED STAKEHOLDERS AND PROGRAM SPONSORS IN THE EVALUATION PROCESS. IN ADDITION, THE PRIORITY OF THE TYPES OF QUESTIONS IN THE EVALUATION FOCUS HAS NOT BEEN DETERMINED. THE EVALUATION REPORT OF THE SERVICE AND REHABILITATION OF STREET CHILDREN ALSO HAS NOT CONVEYED THE OVERALL PROBLEMS OF EACH ACTIVITY IN THE PROGRAM.

KEYWORDS: PROGRAM EVALUATION, STREET CHILDREN SERVICE AND REHABILITATION PROGRAM, THE AGENCY OF SOCIAL SERVICES OF BEKASI CITY

**EVALUATION OF THE SERVICE AND REHABILITATION PROGRAM
FOR STREET CHILDREN AT THE AGENCY OF SOCIAL SERVICES OF BEKASI CITY****ABSTRAK**

PENELITIAN INI DILATARBELAKANGI ADANYA FENOMENA ANAK JALANAN YANG MENGALAMI PENINGKATAN TIAP TAHUN DAN KEHADIRAN ANAK JALANAN YANG MERESAHKAN JUGA MENGANGGU MASYARAKAT DI KOTA BEKASI. UNTUK MENEKAN JUMLAH DAN MEMULIHKAN FUNGSI SOSIAL ANAK JALANAN, DINAS SOSIAL KOTA BEKASI MENGADAKAN PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI ANAK JALANAN. NAMUN, SETELAH PROGRAM INI DITERAPKAN ANAK JALANAN MASIH KEMBALI KE JALAN DAN BELUM BERPERILAKU SESUAI DENGAN NILAI DAN NORMA SOSIAL YANG BERLAKU. PENULIS MELIHAT ADANYA PERMASALAHAN DALAM EVALUASI PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI ANAK JALANAN. TUJUAN PENELITIAN INI UNTUK MENGETAHUI DAN MENGANALISIS BAGAIMANA EVALUASI PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI ANAK JALANAN DI DINAS SOSIAL KOTA BEKASI. DENGAN MENGGUNAKAN TEORI YAITU LIMA LANGKAH PELAKSANAAN EVALUASI PROGRAM MENURUT DEBRA J. HOLDEN DAN MARC A. ZIMMERMAN (2012) YAITU ASSESS CONTEXT, GATHER RECONNAISSANCE, ENGAGE STAKEHOLDERS, DESCRIBE THE PROGRAM, DAN FOCUS THE EVALUATION. METODE DALAM PENELITIAN INI MENGGUNAKAN METODE PENELITIAN KUALITATIF. HASIL PENELITIAN MENUNJUKKAN BAHWA PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI ANAK JALANAN DI DINAS SOSIAL KOTA BEKASI BELUM BERJALAN DENGAN BAIK, DIKARENAKAN EVALUASI PROGRAM TERSEBUT BELUM INFORMATIF DALAM PENYAMPAIAN HASIL EVALUASI SERTA BELUM MENUNJUKKAN KEMAJUAN EFISIEN PROGRAM, SEHINGGA BELUM SESUAI DENGAN LIMA LANGKAH PELAKSANAAN EVALUASI PROGRAM TERSEBUT. KEMUDIAN, MASIH DITEMUKANNYA PERMASALAHAN PADA SARANA DAN PRASARANA PROGRAM BELUM DAPAT DIGUNAKAN SECARA MAKSIMAL DAN MASIH TERDAPAT KEKURANGAN. RANCANGAN MATRIKS PERENCANAAN EVALUASI PROGRAM BELUM TERSUSUN DAN BELUM MELIBATKAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN SERTA SPONSOR PROGRAM DALAM PROSES EVALUASI. SELAIN ITU, BELUM DITENTUKAN PRIORITAS JENIS PERTANYAAN DALAM FOKUS EVALUASI. LAPORAN EVALUASI PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI ANAK JALANAN JUGA BELUM MENYAMPAIKAN SECARA KESELURUHAN PERMASALAHAN DARI SETIAP KEGIATAN DALAM PROGRAM.

KATA KUNCI: EVALUASI PROGRAM, PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI ANAK JALANAN, DINAS SOSIAL KOTA BEKASI

PENDAHULUAN

Fenomena permasalahan sosial yang meningkat baik di Kota Jakarta maupun daerah penyangga ibu kota. Fenomena tersebut disebabkan pertumbuhan populasi penduduk yang bertambah serta kompleksitas proses pembangunan yang juga meningkat sehingga menyebabkan masyarakat dengan strata sosial rendah muncul. Masyarakat strata sosial rendah dikenal dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sendiri merupakan perseorangan; keluarga; kelompok dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga kebutuhan hidup baik jasmani, rohani, dan sosial tidak dapat terpenuhi secara memadai dan wajar (Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012). Anak jalanan termasuk dalam salah satu kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Anak Jalanan adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari, dengan kriteria menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan maupun di tempat-tempat umum dan mencari rezeki dan/atau berkeliaran di jalanan maupun tempat-tempat umum (Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012). Di Kota Bekasi sebagai daerah kota dengan arus urbanisasi yang tinggi. Jumlah penduduk mencapai 2.448.309 jiwa dengan rata-rata kepadatan penduduk 12.106 jiwa/km² dan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,46% (BPS Kota Bekasi, 2020). Oleh sebab itu, keberadaan anak jalanan di Kota Bekasi tidak dapat terbantahkan. Pada Tahun 2019 jumlah anak jalanan mencapai 2.935 orang anak yang dilansir dari Open Data Jabar. Dengan persentase 60% anak jalanan berasal dari wilayah Kota Bekasi dan 40% di luar Kota Bekasi.

Dalam upaya menegakan perlindungan anak, yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002

Tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak. Maka, Dinas Sosial Kota Bekasi membuat program pelayanan dan rehabilitasi anak jalanan. Program tersebut didasari oleh Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Program pelayanan dan rehabilitasi anak jalanan ini memiliki tujuan menekan jumlah anak jalanan dan memulihkan kembali fungsi sosial mereka. Dengan beragam kegiatan positif yang dilaksanakan selama sepuluh hari di Rumah Singgah Pedurenan. Program tersebut mulai dilaksanakan pada Tahun 2017. Akan tetapi, program pelayanan dan rehabilitasi anak jalanan belum dapat mencapai tujuan program. Berdasarkan hasil wawancara, capaian kinerja program yang tercapai pada Tahun 2019 sebesar 56% masih jauh dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Lalu, kurangnya sumber daya manusia sebagai pendamping dan pembimbing peserta program yakni anak jalanan. Serta kurangnya fasilitas sarana dan prasarana yang menunjang kehidupan anak.

Kemudian, tim anak jalanan sebagai evaluator program pelayanan dan rehabilitasi anak jalanan belum melibatkan para pemangku kepentingan dan sponsor program pada proses pelaksanaan evaluasi. Hal ini menyebabkan tim anak jalanan tidak mengetahui tanggapan atas permasalahan setiap kegiatan dalam program tersebut. Lalu, belum adanya matriks perencanaan evaluasi (*evaluation planning matrix*) yang mencakup proses dan dampak dalam jangka waktu tertentu program pelayanan dan rehabilitasi anak jalanan. Diketahui data sebesar 76% anak jalanan yang telah mengikuti program pelayanan dan rehabilitasi anak jalanan masih kembali ke jalanan dan belum berperilaku sesuai nilai dan norma sosial. Serta belum adanya rekomendasi perbaikan atau solusi untuk pelaksanaan program pelayanan dan rehabilitasi anak jalanan berikutnya. Dikarenakan, tim anak jalanan belum menetapkan jenis pertanyaan evaluasi yang dianggap sangat penting dan belum mendeskripsikan sumber daya (*resources*) yang dibutuhkan setiap kegiatan dalam program.

Berdasarkan latar belakang dan indikasi masalah diatas, maka dapat dilihat bahwa evaluasi program pelayanan dan rehabilitasi anak jalanan belum berjalan dengan efisien, dikarenakan masih ditemui kekurangan pada program dan belum dapat mencapai target program serta tujuan program. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut dengan judul “Evaluasi Program Pelayanan dan Rehabilitasi Anak Jalanan Di Dinas Sosial Kota Bekasi” dengan pertanyaan penelitian “Bagaimana evaluasi program pelayanan dan rehabilitasi anak jalanan di Dinas Sosial Kota Bekasi?”

Kemudian dari latar belakang penelitian diatas, bahwasannya pelaksanaan evaluasi program pelayanan dan rehabilitasi anak jalanan belum dapat mencapai target dan tujuan program juga masih ditemukannya kekurangan dalam pelaksanaan program sehingga anak jalanan di Kota Bekasi tetap tinggi, maka agar pelaksanaan evaluasi program pelayanan dan rehabilitasi anak jalanan di Dinas Sosial Kota Bekasi dapat mencapai tujuan serta target perlu adanya langkah-langkah kemajuan efisien dan informatif perencanaan evaluasi yang dikemukakan oleh Debra J. Holden dan Marc A. Zimmerman, yaitu: (a) *Assess Context*, (b) *Gather Reconnaissance*; (c) *Engage Stakeholders*; (d) *Describe the Program*; dan (e) *Focus the Evaluation*.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif sebagai upaya penulis untuk memahami, menganalisis dan menjelaskan langkah-langkah kemajuan efisien dan informatif perencanaan evaluasi program pelayanan dan rehabilitasi anak jalanan. Selain itu, penulis juga ingin memahami lebih mendalam perihal fenomena yang diteliti. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan wawancara, studi literatur, dan dokumentasi. Kemudian, untuk penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan informan kunci yang mengetahui informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan penelitian. Dengan tujuan untuk mendapatkan data dan informasi supaya tujuan penelitian dapat tercapai. Lalu, dalam menguji keabsahan data penelitian menggunakan teknik triangulasi sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini, penulis akan menyampaikan mengenai hasil penelitian mengenai evaluasi program pelayanan dan rehabilitasi anak jalanan di Dinas Sosial Kota Bekasi. Adapun terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan agar program pelayanan dan rehabilitasi anak jalanan lebih maju secara efektif dan informatif, yang akan penulis tuliskan dalam pembahasan sebagai berikut:

1. *Assess Context*

Merupakan langkah awal dalam proses evaluasi program dari teori Debra J. Holden dan Marc A. Zimmerman. Evaluasi yang berhasil tidak hanya berguna, akurat, praktis dan etis namun juga harus informatif melalui pemahaman karakteristik dan kondisi program. Maka evaluator program perlu untuk merancang dan melakukan studi dalam beberapa konteks politik, sejarah, sumber daya, nilai, kebutuhan, minat serta orang-orang dalam program.

Program pelayanan dan rehabilitasi anak jalanan merupakan salah satu program prioritas Dinas Sosial Kota Bekasi yang dijalankan oleh bidang rehabilitasi sosial. Berawal atas dasar peningkatan anak jalanan yang keberadaannya mengganggu masyarakat Kota Bekasi. Di Kota Bekasi, anak jalanan biasanya melakukan kegiatan mencari rezeki dengan bekerja sebagai pengemis, penjual dan pengamen yang terkadang mengenakan kostum seperti badut. Maka atas dasar rasa kepedulian perlindungan dan pendidikan bagi anak jalanan, sehingga dirancang program dengan kegiatan yang positif terhadap anak jalanan. Program pelayanan dan rehabilitasi anak jalanan ini diatur pada peraturan yang dibuat oleh pemerintah kota, yaitu Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Gambar 1
Anak Jalanan di Kota Bekasi Yang Bekerja
Sebagai Manusia Perak



Sumber: Penulis, 2021

Program ini termasuk dalam tiga program prioritas dinas yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Bekasi Tahun 2018 – 2023. Kemudian, program pelayanan dan rehabilitasi anak jalanan dijalankan sebagai rangkaian kegiatan yang menjadi satu kesatuan bagi peserta program, yakni anak jalanan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup perihal pelayanan kesehatan, pelatihan keterampilan hingga bimbingan-bimbingan untuk anak jalanan. Akan tetapi, program ini belum ada keberlanjutan lebih lanjut atas pelaksanaannya. Dikarenakan pihak Dinas Sosial Kota Bekasi belum menetapkan pelaksanaan dan tujuan program berdasarkan jangka waktu tertentu (jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang). Selama ini, program hanya dilakukan secara jangka pendek selama sepuluh hari.

2. *Gather Reconnaissance*

Pada langkah kedua ini, biasanya evaluasi atau penilaian selalu memiliki tujuan tertentu. Evaluator program perlu menentukan penggunaan informasi evaluasi untuk merencanakan dan merancang evaluasi selanjutnya secara efektif. Dan evaluator program perlu memberikan pemahaman dan bekerja sama dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) mengenai kegunaan hasil evaluasi serta mengidentifikasi hasil yang diinginkan dan tidak ingin dihasilkan oleh program.

Tentu dengan evaluasi ini diharapkan dapat mengetahui seberapa jauh program pelayanan dan rehabilitasi anak jalanan berjalan. Tujuan program tersebut untuk menekan jumlah dan memulihkan fungsi sosial anak jalanan di Kota Bekasi. Perihal penggunaan informasi evaluasi program pelayanan dan rehabilitasi anak jalanan, diketahui persentase realisasi atas pelaksanaan program di Tahun 2018

sebesar 47% dan pada Tahun 2019 sebesar 56%. Maka realisasi program pelayanan dan rehabilitasi anak jalanan belum berdampak baik terhadap peserta program dan belum dapat mencapai target program yang telah ditetapkan, yaitu 100%. Tim anak jalanan sebagai evaluator program belum menjalin kerjasama dengan para pemangku kepentingan sehingga tidak dapat menyampaikan hasil yang diinginkan dan tidak diinginkan dari para pemangku kepentingan program tersebut.

3. *Engage Stakeholders*

Para pemangku kepentingan program merupakan pihak yang penting dalam pengembangan rencana evaluasi karena mereka terlibat langsung dalam penyelenggaraan program dan memahami kondisi lingkungan. Mengidentifikasi para pemangku kepentingan program ini dianggap sebagai proses yang kritis.

Para pemangku kepentingan program pelayanan dan rehabilitasi anak jalanan merupakan pihak-pihak yang memiliki rasa kepedulian terhadap anak jalanan selain Dinas Sosial Kota Bekasi sebagai organisasi perangkat daerah dengan tugas pokok dan fungsi terkait bidang sosial. Berikut para pemangku kepentingan program pelayanan dan rehabilitasi anak jalanan di Kota Bekasi, diantaranya: Yayasan Karya Anak Bangsa dan Yayasan Cahaya Anak Negeri sebagai lembaga sosial anak di Kota Bekasi yang memberikan perlindungan pelayanan kesejahteraan sosial anak; Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Pekerja Sosial Profesional dan Pekerja Sosial Masyarakat sebagai pendamping yang memberikan materi-materi terhadap peserta program; serta Dinas Kesehatan Kota Bekasi (Tim Penjaring Kesehatan) sebagai tim yang bertanggungjawab atas kesehatan anak jalanan. Namun, para pemangku kepentingan program tersebut belum dilibatkan partisipasinya dalam proses perencanaan serta evaluasi program pelayanan dan rehabilitasi anak jalanan, sehingga hanya terlibat dalam penyelenggaraan atau pelaksanaan program.

4. *Describe the Program*

Di langkah keempat ini, menjelaskan program merupakan suatu hal penting

untuk memahami tahap pengembangan program yang akan dievaluasi dan konteks program. Hal ini berkaitan dengan konsep-konsep atau sudut pandang studi evaluasi atau penilaian.

Tim anak jalanan sebagai evaluator program mengemukakan hal yang ingin dicapai dari program pelayanan dan rehabilitasi anak jalanan, yaitu tentunya mengurangi jumlah anak jalanan di Kota Bekasi serta memulihkan fungsi sosial mereka supaya berperilaku sesuai norma dan nilai. Dengan kata lain mendorong Kota Bekasi bebas anak jalanan. Kemudian, mengenai penentuan ukuran atas kinerja dari program pelayanan dan rehabilitasi anak jalanan dilakukan berdasarkan bagaimana pelaksanaan yang berlangsung pada program tersebut. Hal tersebut diketahui dari apakah kinerja program pelayanan dan rehabilitasi anak jalanan sudah relevan dengan tujuan dan perencanaan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, tim anak jalanan juga harus mendeskripsikan sumber daya program dan tujuan program secara menyeluruh baik tujuan jangka pendek hingga tujuan jangka panjang pada kerangka kerja konseptual evaluasi yang akan digunakan. Akan tetapi, belum terdapat kerangka kerja konseptual evaluasi atau dapat disebut dengan matriks perencanaan evaluasi program pelayanan dan rehabilitasi anak jalanan, sehingga dalam penjelasan program tersebut belum meliputi tindakan nyata untuk pelaksanaan program berikutnya serta harapan maupun tanggapan dari para pemangku kepentingan yang terlibat.

5. Focus the Evaluation

Pada langkah terakhir ini, evaluasi harus difokuskan untuk menilai isu-isu yang sangat penting kepada para pemangku kepentingan program. Dikarenakan sumber daya yang tersedia didedikasikan untuk evaluasi dan pengawasan atas program.

Dengan demikian, berkaitan dengan penentuan dan penetapan prioritas jenis pertanyaan evaluasi terhadap program pelayanan dan rehabilitasi anak jalanan. Walaupun, tim anak jalanan sebagai evaluator program sudah membuat daftar pertanyaan evaluasi namun belum dapat menentukan jenis pertanyaan yang dianggap sangat penting. Dikarenakan

komunikasi dengan para pemangku kepentingan dalam evaluasi yang terjalin hanya sebatas menjawab pertanyaan yang diajukan sehingga tidak berada di tahap berdiskusi dan bekerja satu sama lain. Selain itu, hal penting lainnya adalah tim anak jalanan harus memberikan pemahaman tentang batasan-batasan evaluasi yang dapat mendorong harapan realistis. Akan tetapi, penjelasan batasan tersebut tidak dilaksanakan sehingga para pemangku kepentingan dan sponsor program kurang mengerti serta hanya mengetahui hasil evaluasi dari laporan evaluasi program pelayanan dan rehabilitasi anak jalanan yang dibuat oleh tim anak jalanan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis menarik simpulan bahwa evaluasi program pelayanan dan rehabilitasi anak jalanan di Dinas Sosial Kota Bekasi belum berjalan efektif sesuai dengan lima langkah yang dikemukakan oleh Debra J. Holden dan Marc A. Zimmerman. Selain itu, belum dapat menekan jumlah anak jalanan dan memulihkan fungsi sosialnya serta belum dapat mencapai target program sebesar 100% yang telah ditetapkan. Hal ini terlihat dari masih banyaknya kendala atau permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan program pelayanan dan rehabilitasi anak jalanan.

Pelaksanaan evaluasi pada program pelayanan dan rehabilitasi anak jalanan ini belum melibatkan para pemangku kepentingan program dalam struktur proses perencanaan evaluasi (*engage stakeholders*) maka proses komunikasi diantara evaluator program; para pemangku kepentingan; dan sponsor program belum efektif, uraian program pelayanan dan rehabilitasi anak jalanan belum spesifik (*describe the program*) karena belum tersusunnya matriks perencanaan evaluasi atau *evaluation planning matrix* (EPM) yang memudahkan dalam penentuan tujuan; objek serta hasil jangka pendek, hasil jangka menengah dan hasil jangka panjang untuk program pelayanan dan rehabilitasi anak jalanan, penetapan prioritas pertanyaan evaluasi untuk penyelesaian fokus evaluasi belum ditentukan (*focus the evaluation*) karena tim anak jalanan tidak mengetahui tanggapan dari sponsor dan para pemangku kepentingan

program mengenai jenis pertanyaan yang sangat penting dan layak untuk dinilai, akan tetapi tim anak jalanan sebagai evaluator program pelayanan dan rehabilitasi anak jalanan sudah mampu menyampaikan pemahaman atas kondisi lingkungan pada program tersebut (*assess context*) hal ini tertuliskan pada bagian gambaran umum, lalu informasi program pelayanan dan rehabilitasi anak jalanan yang diperoleh wajib ditinjau kembali (*gather reconnaissance*) oleh tim anak jalanan supaya temuan informasi tersebut valid untuk kegunaan evaluasi. Dengan demikian, dapat diketahui hasil evaluasi program yang dilakukan di Dinas Sosial Kota Bekasi belum dapat mencapai target program pelayanan dan rehabilitasi anak jalanan yang telah ditetapkan serta belum terwujudnya tujuan program dalam menekan jumlah dan memulihkan fungsi sosial anak jalanan. Sarana dan prasarana yang tersedia di Rumah Singgah Pedurenan belum dapat digunakan secara maksimal. Selain itu, belum ada keberlanjutan program pelayanan dan rehabilitasi anak jalanan, sehingga perubahan kondisi anak jalanan di Kota Bekasi belum terlihat secara signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Di Jawa Barat Tahun 2014-2019.
- Kota Bekasi dalam Angka (*Bekasi Municipality In Figures*) 2020.
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches (Third Edit)*. California: SAGE Publications.
- Holden, D. J., & Zimmerman, M. A. (2012). *A Practical Guide to Program Evaluation Planning*. California: SAGE Publications.
- Nugroho, R. (2003). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- O'Sullivan, R. G. (2004). *Practicing Evaluation: A Collaborative Approach*. California: SAGE Publications.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.
- Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak.
- Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
- Stufflebeam, D. L., Madaus, G. F., & Kellaghan, T. (2002). *Evaluation Models (Viewpoints on Educational and Human Services Evaluation) Second Edition*. New York: Kluwer Academic Publishers.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Alfabeta CV.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.